**Pengaruh Kepemimpinan Dalam Penanganan Masalah Sosial**

**(Studi Kasus Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Yoyjakarta)**

**Nur Afni, Muhammad Rizki, Jamilludin**

(UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta, E-mail: [nurafniilyas@gmail.com](mailto:nurafniilyas@gmail.com))

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kepemimpinan dalam pengentasan Masalah sosial dan model kepemimpinan yang diterapakan di Kelurahan Desa Panggungharo Kecamatan Sewon Yogyakarta. Jenis penelitian adalah penelitian deskripstif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat besar pengaruh sistem kepemimpinan dalam pengentasan masalah sosial terhadap Keluharan Desa Panggungharjo. Hal tersebut dilakukan dengan membangun lembaga-lembaga Kemasyarakatan di desa tersebut untuk menguragi masalah sosial dalam permberdayaan. Lembaga yang terdapat di Desa Panggungharjo terdappat 13 lembaga diantaranya adalah: 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 2) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. 3) Karang Taruna Cahyaning Amerta. 4) Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. 5) Rukun Tetangga. 6) Sanggar Anak Desa. 7) Bumi Panggung. 8) Bumdes Panggung Lestari. 9) Bapel Jps. 10) Pengelola Sistem Informasi Desa. 11) Lembaga Mediasi Desa. 12) Pakarti. 13) Gabungan Kelompok Tani. Adapun lembaga Desa Panggungarjo ini dibentuk untuk mengampu sebagian besar pelayanan atas barang dan jasa kepada masyarakat dan besar harapan juga dapat mengurangi masalah sosial di desa tersebut. Dengan adanya sistem pemerintahan yang sekarang dapat memeberi pengaruh besar terhadap Desa Panggungharjo dalam mengentaskan masalah sosial.

**Kata Kunci:** *Pengaruh Kepemimpinan, Penaganan Masalah Sosial.*

**Abstract**

*This study aims to determine how the influence of leadership in alleviating social problems in Panggungharo Village, Sewon District, Yogyakarta. This type of research is descriptive qualitative research. The data collection technique was carried out by means of observation, interviews and documentation with informants. The results of the study indicate that the leadership system has a very large influence on social problems attesting to the Panggungharjo Village Headquarters. This is done by building community institutions in the village to reduce social problems in empowerment. Institutions in Panggungharjo Village have 13 institutions including: 1) Community Empowerment Institutions. 2) Family Welfare Empowerment Team. 3) Posthumous Cahyaning Amerta Youth Organization. 4) Activity Group of Village Community Empowerment Institutions. 5) Rukun Neighbors. 6) Village Children's Studio. 7) Earth stage. 8) Bumdes Panggung Lestari. 9) Bapel Jps). 10) Village Information System. 11) Village Mediation Institution. 12) Pakarti. 13) Joint Farmer Group. The Panggungarjo Village institution was formed to handle most of the services for goods and services to the community and it is hoped that it will also reduce social problems in the village. With the current government system, it can have a big influence on Panggungharjo Village in alleviating social problems.*

**Keywords**: *Influence of Leadership, Handling Social Problems*

18

**PENDAHULUAN**

Masalah Sosial sebagai situasi tertentu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sebagian besar orang yang setuju bahwa tindakan harus dilakukan untuk mengubah situasi itu. Para pekerja sosial seringkali mendefinisikan masalah sosial sebagai terganggunya keberfungsian sosial individu, kelompok atau komunitas sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, dan merealisasikan nilai-nilai yang dianutnya, serta menjalankan peranan-peranannya di masyarakat. Masalah sosial juga diartikan sebagai sebuah kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diharapkan.[[1]](#footnote-1)

Kemiskinan, pengangguran, penyebaran HIV/AIDS, perceraian, kenakalan remaja, misalnya, adalah contoh masalah sosial, karena merupakan kondisi atau keadaan yang tidak diinginkan oleh hampir semua orang. Masalah sosial tertentu mungkin hanya dipandang sebagai masalah atau kondisi yang tidak menyenangkan oleh sebagian orang saja. Remaja yang memainkan musik *rock* atau metal yang memekakkan telinga di sebuah alun-alun mungkin tidak memandang “kegaduhan” tersebut sebagai sebuah masalah. Tetapi, orang-orang lainnya mungkin berpendapat bahwa musik *rock* sebagai sebuah masalah sosial. Para perokok tentu saja tidak akan memandang kebiasaan merokok sebagai masalah sosial. Tetapi, bagi mereka yang tidak merokok, kebiasaan merokok merupakan masalah social karena dipandang membahayakan kesehatan baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Sebuah fenomena dikatakan sebuah masalah sosial biasanya karena menjadi perhatian publik. Peran media massa di sini sangat penting. Karena media massa seperti koran, televisi atau radio merupakan saranan komunikasi yang bisa menjadi ukuran apakah fenomena itu menjadi perhatian publik atau tidak.[[2]](#footnote-2)

Kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan salah terhadap anak (*child abuse*), penyalahgunaan obat-obat terlarang, kerusakan lingkungan polusi, kelangkaan air bersih, persebaran flu burung, HIV/AIDS, busung lapar adalah beberapa contoh masalah sosial karena sering disiarkan atau dipublikasikan oleh mediamassa.Kemiskinan merupakan masalah umat yang senantiasa menjadi problematika kehidupan di setiap daerah, merupakan pekerjaan rumah yang memerlukan penanganan khusus bukan sajamengenai pembiayaan hidup untuk diri dan keluarganya akan tetapi permasalahan kehidupan itu sendiri atau perilaku hidup yang bersumber sebagian besar permasalahan kemiskinan pada rendahnya pendidikan dan keterampilan yang rendah disamping faktor alam yang tidak bisa dihindari oleh manusia semisal bencana alam. Keterbatasan lahan usaha, langkanya lapangan kerja dan terbatasnya investasi, kesalahan manajemen, keterbatasan akses permodalan dan juga terbatasnya akses informasi melengkapi penyebab kemiskinan itu. Walaupun berbagai program kemiskinan selalu melakukan perbaikan namun belum ada yang secara pasti dapat menanggulangi masalah kemiskinan secara global. Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari suatu negara demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Proses peningkatan kualitas hidup difokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan gagasan-gagasan konstruktif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Namun tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti adanya kemiskinan. Kemiskinan muncul dari adanya implikasi kesenjangan sosial. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengana permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, pengemis, gelandangan, keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, tuna susila, pengangguran, kejahatan, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain.

19

Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan sebagai perwujudan tempat tinggal yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlndungan untuk mendapatkan dan menghuni perumaan yang layak dan sehat. Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia, memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Nilai strategis tersebut tercermin pada posisi rumah sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota keluarganya. Rumah atau perumahan merupakan salah satu jenis kebutuhan dasar, mutlak memerlukan pemenuhan.

Badan Pusat Statistik (BPS), menampilkan data angka kemiskinan di Indonesia per bulan Septermber 2020 sebesar 27,55 juta orang atau sebesar 10,19% dari total jumlah penduduk Indonesia saat ini. Jumlah tersebut apabila di prosentase di wilayah perkotaan per September 2020 sebesar 7,88%. Sedangkan prosentase jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan pada September 2020 sebesar 13,20% (BPS, 2020). Sehingga hal tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan demi tercapainya kesejahteraan sosial dari tingkat nasional hingga tingkat desa/kelurahan.

Proses penanggulangan kemiskinan ini berdampak pada keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pelayanan diatur dalam Undang-Undang penyelenggaraan kesejahteraan sosial Nomor 11 Tahun 2009. Menurut undang-undang tersebut, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah kepada suatu objek yang akan terjadinya proses kegiatan, dengan terpadunya sistem tata laksana, masyarakat dan pemerintah daerah menjadi keseimbangan penyelenggaraan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar warga negara, yang meliputi jaminan sosial, rehabilitasisosial, perlindungan social dan pemberdayaan sosial. Pelayanan sosial dalam arti luas merupakan pelaksanaan kegiatan yang mencakup kearah pengembangan, terlihat pada pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang ekonomi, kesehatan, keluarga miskin, cacat pendidikan, dan tuna sosial.Terciptanya pelayanan sosial berbasis penanggulangan kemiskinan menjadi proteksi utama bagi pemerintah.

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang amat penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan, khususnya pada masyarakat Indonesia yang masih memiliki jiwa gotong royong dan kepedulian yang cukup tinggi. Untuk itu, masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran akan keberadaan dan keterlibatan mereka itu sendiri sehingga muncul suatu niat pada masyarakat untuk turut serta bersama pemerintah dalam membangun negara. Pemerintah desa sebagai pihak pelaksana program , memiliki peran yang amat penting dalam pencapaian program ini serta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu kelompok untuk mencapai tujuannya. Pemerintahan desa dalam penelitian ini pada adalah seorang Kepala desa. Kepala desa diharapkan dapat mengakomodir dan mengatur serta memiliki kepekaan sebagai tindakan terhadap setiap permasalahan dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang dan dapat menimbulkan partisipasi dari masyarakat. [[3]](#footnote-3)

20

Kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang berorientasi pada manusia (Kartono, 2009: 86), dalam hal ini adalah masyarakat yang dipimpinnya beserta sekretaris desa, staff dan bawahannya di dalam pemerintahan desa, dan pemimpin yang dapat memberikan bimbingan dan arahan yang efisien kepada para masyarakatnya. Menurut White dan Lippit dalam Pasolong , tipe Kepemimpinan Demokratis merupakan kepemimpinan yang mementingkan tercapainya tujuan kelompok seoptimal mungkin dengan cara mengikutsertakan partisipasi seluruh anggota kelompok, tenaga dan juga seluruh rasa tanggung jawab bersama. Menurut Suroso dkk, faktor yang mampu mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan diantaranya adalah: usia, pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, lamanya tinggal di desa tersebut, tingkat komunikasi dan kepemimpinan. Faktor kunci dan utama yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah kepemimpinan (Bennis dan Nanus dalam Pasolong. Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat. Kepemimpinan sangat penting dan amat menentukan dalam kehidupan setiap bangsa, karena maju mundurnya masyarakat, jatuh bangunnya bangsa, ditentukan oleh pimpinannya. [[4]](#footnote-4).

**METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian sosial menggunakan model deskriptif kualitatif bertujuan Untuk menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan rupanya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.[[5]](#footnote-5) Berdasarkan latar belakang dan tujuan peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian studi deskriptif kualitatif untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis keadaan dan fakta-fakta yang terjadi mengenai program di Kelurahan Panggunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta.

21

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-berar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan yang akan diteliti sebanyak 5 orang, yaitu 1 Perangkat dan 1 tim pelaksana pusat kesejahteraan sosial (Puskesos), 1 orang TKSK dan 2 orang warga masyarakat penerima manfaat pelayanan Puskesos yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Sejarah Pembentukan Desa Panggung Harjo Pembentukan Kalurahan Panggungharjo diawali dengan penggabungan dari tiga kelurahan yakni kelurahan Cabeyan, kelurahan Prancak, dan kelurahan Krapyak. Kalurahan (sebutan untuk desa-desa di Provinsi DIY) ini dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Pemerintah Daerah Yogyakarta Nomor 148/D.Pem.D/OP tertanggal 23 September 1947 yang dengan keputusan dewan pemerintah. Dan pada waktu itu Hardjo Sumarto diangkat sebagai Lurah Kalurahan Panggungharjo yang pertama. Perkembangan Kalurahan Panggungharjo jika dilihat dari aspek kebuadayaan dimulai dari abad ke 9-10 yang merupakan kawasan agraris, hal ini dibuktikan dengan adanya Situs Yoni Karang Gede di Pedukuhan Ngireng-Ireng. Sehingga dari budaya agraris ini muncul budaya seperti: Gejok Lesung, Thek-thek/Kothek-an, Upacara Merti Dusun, Upacara Wiwitan, Tingkep Tandur, dan budaya-budaya lain yang sifatnya adalah merupakan pengormatan kepada alam yang telah menumbuhkan makanan sehingga bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia. kemudian pada abad ke 16 di wilayah Krapyak Kulon dan Glugo yang saat ini menjadi nama padukuhan di Kalurahan Panggungharjo adalah merupakan kawasan wisata berburu (Pangeran Sedo Krapyak – 1613), dan pada Abad ke 17 kawasan ini merupakan sebagai tempat olahraga memanah kijang/menjangan dan sebagai tempat pertahanan (Sultan HB I – Panggung Krapyak 1760). Budaya yang dilakukan dari intervensi keberadaan Kraton Mataram sebagai pusat budaya sehingga menjadi budaya adiluhung yaitu : Panembromo, Karawitan, Mocopat, Wayang, Ketoprak, Kerajinan Tatah Sungging, Kerajinan Blangkon, Kerajinan Tenun Lurik, Batik, Industri Gamelan, Tari-tarian Klasik, dan lain sebagainya. saat ini, berbagai ruang (tempat dan alat) untuk melestarikan budaya terus dipenuhi, salah satunya pembangunan balai budaya.pembangunannya dimulai awal April 2021. Tidak hanya perkembangan dari budaya saja tetapi Dari aspek keagamaan juga ikut berkembang dan Pada tahun 1911 di wilayah Krapyak Kulon didirikan Pondok Pesantren Al Munawir, sehingga kegiatan-kegiatan seperti : Sholawatan, Dzibaan, Qosidah, Hadroh, Rodad, Marawis, dan juga budaya-budaya yang melekat pada kegiatan peribadatan seperti : Syuran (peringatan 1 Muharram), Mauludan (peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW), Rejeban (peringatan Isro’ Mi’roj), Ruwahan/Nyadran (mengirim doa untuk leluhur menjelang Bulan Ramadhan), Selikuran (Nuzulul Qur’an), dan lainnya yang masih dipertahankan. Hal ini bisa kita simpulkan, menjadi faktor penyebab mayoritas penduduk beragama islam di Kalurahan Panggungharjo. tahun 1900-1930 dengan adanya perkembangan budaya yang semakin tumbuh dan berkembang, maka dengan hal itu kebutuhan bersosialisasi dimasyarakat juga terus mengikuti. Sehingga berkembanglah bermacam-macam dolanan anak seperti: Egrang, Gobak Sodor, Benthik, Neker-an, Umbul, Ulur/layangan, Wil-wo, dan lain-lain. Bahkan di kampung Pandes berkembang sebuah komunitas “Kampung Dolanan” yang memproduksi permainan anak tempo doeloe, seperti : Othok-Othok, Kitiran, Angkrek, Keseran, Wayang Kertas, dan lainnya. Perkembangan ini banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat. Terutama dari aspek ekonomi, budaya khas kalurahan dan sosial masyarakat. Karena dengan adanya ruang-ruang seperti ini maka adanya interaksi masyarakat yang berdampak rasa kepedulian antara satu dengan yang lain.

Pada Tahun 1980 di Kalurahan Panggungharjo menjadi wilayah sub-urban. Sehingga mulai berkembang Budaya Modern Perkotaan dan banyak mempengaruhi Generasi Muda. Perkembangan ini membawa berbagai macam kesenian ala milenial seperti: kesenian Band, Drumband, Karnaval Takbiran, Tari-tarian Modern, Campur Sari, Outbond, Playstation/Game Rental, dan lain-lain, yang menjadi warna-warni dalam kehidupan bermasyarakat di Kalurahan Panggungharjo. Adanya berbagai kegiatan di kalurahan Panggungharjo menjadi arena tumbuhnya demokrasi yang mendorong nilai-nilai kemanusiaan tetap terpelihara. Adanya ruang-ruang yang menjadi arena perumpulan warga, dapa menjadi ruang pertukaran ide, gagasan, yang notabenenya untuk kemajuan dan perubahan.

22

1. Geografi Kelurahan Desa Panggungharjo

Kelurahan Panggungharjo berada di bawah wilayah Kecamatan Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Kalurahan Panggungharjo memiliki wilayah berbatasana (sebelah utara) dengan Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta. Sebelah selatan berbatasana dengan Kalurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Bantul dan Sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Kalurahan Panggungharjo memiliki luas wilayah 560,9660 hektar, dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 45 m. Di Kalurahan Panggungharjo Luas tanah sawah 278,47 Ha, tanah kering 396,37 Ha dan tanah yang digunakan untuk fasilitas umum 90,60 Ha. Dan sisanya untuk pemikiman, perumahan, pemakaman dan lain sebagainya. Aksesbilitas Kalurahan Panggungharjo menunjukkan bahwa jarak dari pusat kecamatan adalah 2 km, jarak dari ibu kota kabupaten adalah 8 km, jarak dari ibukota provinsi adalah 7 km, dan jarak dari ibu kota negara adalah 500 km.

23

Pembagian wilayah Kalurahan Panggungharjo dapat dilihat berdasarkan sifat atau karakteristiknya: Kawasan Pertanian (Kring Selatan) Peruntukan lahan untuk kegiatan pertanian meliputi Pedukuhan Garon, Cabeyan, Ngireng Ireng, Geneng dan Jaranan. Kawasan ini merupakan penyangga produksi padi untuk Kalurahan Panggungharjo. Untuk Kawasan Pusat Pemerintahan (Kring Tengah) meliputi Pedukuhan Pelemsewu, Kweni, Sawit, Glondong dan Pedukuhan Pandes. Dan Kawasan Aglomerasi Perkotaan (Kring Utara) Yang sering disebut kring utara (sebelah utara ring road) telah berkembang menjadi aglomerasi perkotaan yang disebabkan alih fungsi tanah persawahan ke pemukiman cukup tinggi. Hal ini meliputi: Pedukuhan Krapyak Wetan, Krapyak Kulon, Dongkelan dan Pedukuhan Glugo. [[6]](#footnote-6)

1. Struktur Kepemimpinan Kelurahan Desa Panggungharjo

Kepemimpinan Kepala Desa sangat mempengaruhi arah pembangunan desa. Sampai saat ini, Kalurahan Panggungharjo telah melalui enam masa kepemimpinan oleh beberapa lurah, yaitu:[[7]](#footnote-7)

1. Hardjo Sumarto, 1946-1948;
2. Pawiro Sudarmo;
3. R. Broto Asmoro;
4. Siti Sremah Sri Jazuli, 1987-1989;
5. H. Samidjo, 1992-2000, 2002-2012;
6. Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm., Apt, 2012-2018, 2018 sampai sekarang.
7. Prestasi Desa Panggungharjo

Sebelum Undang-Undang Desa lahir, Desa/Kalurahan Panggungharjo telah mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain: (sebelum tahun 2013), Juara II Kabupaten, Lomba Kompetisi PERSIBA Divisi I Tahun 1992, Juara II Kabupaten, Lomba Desa Kantibmas HUT Bhayangkara Ke-57 Polda DIY Tahun 2003, Juara I Kabupaten, Lomba Evaluasi Pembangunan Desa Kabupaten Bantul 2005, Juara I Kabupaten, Lomba Paduan Suara Se-Kabupaten Bantul KGPH Mangkubumi. Kemudian pada tahun 2013 sampai tahun 2021, Kalurahan Panggungharjo mendapatkan penghargaan baik dari level kabupaten, provinsi maupun nasional.

Prestasi tersebut, antara lain: Juara I Kabupaten, Lomba UP2K PKK 2013, Juara I Kabupaten, Lomba Gugus Paud 2013, Juara I Kabupaten, Lomba HATINYA PKK 2013, Juara I Nasional, Lomba Keterpaduan Posyandu-Paud Dan Bina Keluarga Balita (Bkb) 2013, Juara II Kabupaten, Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bantul 2013, Juara I Kecamatan, Lomba Satuan Paud Sejenis (Sps) 2013, Proyek Percontohan Desa Ramah Anak Tahun 2013 Oleh BPPM DIY, Juara Harapan II Kabupaten, Lomba Pemberdayaan Rt (Rt 12 Sorowajan Glugo) 2013, Juara II Kabupaten, Lomba Masak Pkk 2013, Juara I Nasional, Lomba Desa Tingkat Nasional 2014, Juara I Kabupaten, Perlombaan Petani Berprestasi 2014, Juara I Kabupaten, Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bantul 2014, Lima Nominator Penerima *Eagle Award* Tahun 2014 Untuk Kampoeng Dolanan, Juara Ii Kabupaten, Lomba P2WKSS 2015, Juara Iii Provinsi, Lomba Hatinya PKK 2015, Juara 1 Provinsi, Lomba UP2K PKK Tingkat Propinsi DIY 2016, Pelaksana Terbaik, Monev 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten, Desa Terbaik Bidang Pendidikan Versi Kemendesa, Juara I Nasional, Lomba UP2K PKK Tingkat Nasional.

24

Tahun 2017 Juara II Lomba Bina Keluarga Lansia 2017, Juara II Kabupaten, Lomba Desa Siaga Tingkat Kabupaten Bantul 2017, Juara I Provinsi, Lomba HKG PKK KKBPK Kes Tingkat Propinsi DIY 2017, Juara II Provinsi, Lomba Tertib Administrasi PKK Tingkat Propinsi DIY 2017, Juara III Provinsi, Lomba PAAR Tingkat Propinsi DIY 2017, Juara V Provinsi, HATINYA PKK Tingkat Propinsi DIY 2017, Juara I Nasional, Lomba *Unspoken Talent Night Festival Theater Inklusi* 2017, Juara III Provinsi, Festival Upacara Adat Dinas Kebudayaan DIY Tahun 2017, Juara II, Lomba Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Kedokteran UGM 2017, Juara II, Lomba Kantibmas Tingkat Polwil Yogyakarta 2017, Juara I Kabupaten, Lomba Gapoktan Berprestasi Tingkat Kabupaten, Juara I Provinsi, Lomba Gapoktan Berprestasi Tingkat Propinsi, Juara I Nasional, Lomba Gapoktan Berprestasi Tingkat Nasional, Desa Inspiratif Versi Kemendesa, Juara I Lomba Desa Pangan Aman Tingkat Nasional Tahun 2021.[[8]](#footnote-8)

Prestasi yang diperoleh Kalurahan Panggungharjo adalah sebagai buah dari kerja-kerja kesemestaan yang peruntukannya tidak hanya untuk yang berprestasi, bukan pula hanya untuk negara, tetapi untuk seluruh masyarakat Kalurahan Panggungharjo. Karya yang mengantarkan kalurahan Panggungharjo mendapatkan banyak apresiasi. Sehingga, karya tidak hanya sekedar pajangan untuk dipublikasikan, namun ada nilai yang membangkitkan semangat mewujudkan mimpi. Karena karya adalah sebagai penghormatan atas hidup.

1. Masalah Sosial

Pada umummnya kondisi kehidupan Kalurahan Panggungharjo hampir sama dengan sistem perkotaan yang masih mempunyai masalah sosial seperti kenakalan remaja, gelandangan, KDRT, Tidak mempunyai rumah dan masalah sosial lainnya.

1. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan. Lembaga Kemasyarakatan Desa Kalurahan Panggungharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Desa No. 9 Tahun 2013. Lembaga-lembaga tersebut antara lain :

25

LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga mitra strategis di luar pemerintahan desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat desa. Di lain sisi, Kehadiran LPMD ikut serta di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Sebelum berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2001 dahulu bernama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). LKMD semasa itu merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus LPMD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam peraturan tersebut diatur pada pasal 7 bahwa LPM Desa mempunyai tugas: Menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong dan membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, disebutkan bahwa LPM Desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai beberapa fungsi yaitu: Pertama, Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; Kedua Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; Ketiga, Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; Keempat, Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; Kelima, Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; Keenam, Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga mitra strategis di luar pemerintahan desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat desa. Di lain sisi, Kehadiran LPMD ikut serta di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Sebelum berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2001 dahulu bernama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). LKMD semasa itu merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

26

Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus LPMD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam peraturan tersebut diatur pada pasal 7 bahwa LPM Desa mempunyai tugas: Menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong dan membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, disebutkan bahwa LPM Desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai beberapa fungsi yaitu: Pertama, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; Kedua Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; Ketiga, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; Keempat, Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; Kelima, Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; Keenam, penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Karang Taruna Cahyaning Anumerta

Karang Taruna Cahyaning Anumerta merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial untuk masyarakat khususnya generasi muda yang ada di Kalurahan Panggungharjo. Karang Taruna Sebagai organisasi sosial kepemudaan yang hadir sebagai wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Karang Taruna beranggotakan pemuda dan pemudi (mulai dari usia 11 – 45 tahun) dan batasan sebagai Pengurus adalah berusia mulai 17 – 35 tahun. Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, ketrampilan, advokasi, keagamaan dan kesenian.

Pok Giat LPMD (Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Kehadiran Kelompok Giat LPMD tugas dan fungsinya adalah menyusun rencana partisipatif, melaksanakan, mengendalikan pemanfaatan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif serta menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam kepengurusan Pok Giat LPMD, membagi tujuh bidang, antara lain: Bidang Organisasi, Kebijakan Publik, Hukum, Ham dan Politik, bidang Keistimewaan (seni, Budaya, Pariwisata), Bidang Kesetaraan Gender, Bidang Keagamaan, Bidang Pendidikan (Pemuda Olahraga, Pelajar dan Mahasiswa), Bidang Kesehatan Lingkungan dan Mitigasi Bencana, dan Bidang Informasi dan Teknologi, Koperasi, UMKM, Kewirausahan.

RT (Rukun Tetangga)

Rukun Tetangga (RT) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan bentuk guyub rukunnya masyarakat dalam membantu Pemerintah Desa untuk menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat, memelihara kerukunan bertetangga dan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan. Ketetapan yang ada di Kalurahan Panggungharjo terkai RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Fungsinya adalah pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya, pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Sanggar Anak Desa (SADEPA)

SADEPA adalah akronim dari Sanggar Anak Desa Panggungharjo yang merupakan sebuah forum anak di Desa Panggungharjo dan berguna sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berumur 18 tahun. Selain sebagai wadah partisipasi anak, SADEPA juga berguna sebagai wadah pemenuhan hak-hak dasar anak yang terdiri dari hak untuk hidup, untuk tumbuh kembang, serta untuk mendapatkan perlindungan. Forum anak SADEPA ini sengaja dibentuk oleh Pemerintah Desa Panggungharjo dengan tujuan mendorong anak agar dapat aktif mengembangkan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan masing-masing anak tersebut.

27

Tugas Pokok SADEPA adalah pertama, sarana penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa, nasionalisme, patriotisme serta pengembangan karakter bangsa; kedua, Sarana menuangkan aspirasi dan kreativitas anak di desa yang disampaikan dengan suasana bermain, partisipatif dan rekreatif; ketiga, sarana peningkatan mutu serta kualitas anak; dan keempat, sebagai wadah aspirasi anak dalam pembangunan di Kelurahan Panggungharjo.

Anggota SADEPA merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak-anak dan dibina langsung oleh Pemerintah Desa Panggungharjo sebagai media pendengar dan pemenuh aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Hingga saat ini jumlah anggota SADEPA kurang lebihnya ada 30 orang dengan umur sekitar 15-19 tahun dan masih membuka kesempatan bagi anak-anak lain di wilayah Desa Panggungharjo untuk bergabung. Namun untuk bergabung menjadi anggota SADEPA-pun ada syaratnya, yaitu anak dengan minimal usia setingkat kelas 1 SMP sampai 18 tahun, bertempat tinggal di Desa Panggungharjo, punya kemauan memperjuangkan hak-hak dasar anak, dan aktif dalam organisasi. Pertemuan rutin SADEPA sendiri biasanya diselenggarakan satu bulan sekali dengan tempat yang tidak menentu, terkadang di Balai Desa Panggungharjo, Podjok Budaya Pandes, atau rumah anggota. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kesekretariatan tetap untuk SADEPA ini.

Selama ini SADEPA telah beberapa kali menjalankan program baik program dari SADEPA sendiri maupun program kerjasama dengan lembaga lain, seperti: Kemah Anak Desa, Peresmian Sanggar Anak Desa dan Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan, Bakti Sosial, Festival Panggug Bertakbir, *Outbound* Sanggar Anak Desa Panggungharjo dan Workshop Pengelolaan Perpustakaan.

Hingga saat ini SADEPA mempunyai beberapa program unggulan disusun dengan tata cara musyawarah mufakat antar anggota dengan mengedepankan prinsip kebermanfaatan untuk masyarakat, khususnya anak-anak. Adapun program unggulan tersebut yaitu: Pertama, Pustakawruh. Pustakawruh merupakan satu Taman Baca Masyarakat (TBM) yang dikelola secara mandiri oleh Forum Anak SADEPA. Pustakawruh mempunyai makna: menyebarkan ilmu melalui buku. Di TBM Pustakawruh ini telah mempunyai koleksi kurang lebih 1200 buku yang merupakan hasil hibah maupun sumbangan dari lembaga lain ataupun masyarakat umum. Untuk kesekretariatan sendiri hingga kini belum mempunyai lokasi tetap dan masih berada di Kantor PSID Panggungharjo. Kedua, Pustakaliling. Pustakaliling merupakan satu program turunan dari TBM PustaKawruh yang dikelola secara mandiri oleh Forum Anak Sadepa.

28

Pustakaliling merupakan akronim dari dua unsur kata yaitu Pustaka dan Keliling. Pustakaliling ini adalah satu program TBM bergerak di Desa Panggungharjo yang secara teknis melakukan roadshow gerakan gemar membaca ke pedukuhan-pedukuhan di Desa Panggungharjo menggunakan *book bike* (sepeda buku) untuk meningkatkan minat baca di masyarakat khususnya bagi anak-anak. Ketiga, Pustakatalog merupakan satu program turunan dari TBM PustaKawruh yang dikelola secara mandiri oleh Forum Anak SADEPA. Pustakatalog merupakan akronim dari dua unsur kata yaitu Pustaka dan Katalog. PustaKatalog ini berupa satu program katalogisasi buku koleksi TBM PustaKawruh berbasis website.

Diharapkan dengan adanya Pustakatalog ini bisa memudahkan masyarakat untuk mengetahui koleksi buku di TBM PustaKawruh secara online. Keempat, Bioskop Anak Desa. Bioskop Anak Desa merupakan satu program pemutaran film dengan konten ditujukan untuk anak-anak dan mempunyai nilai-nilai yang dapat diambil dari film tersebut. Tujuan dari pemutaran film ini yaitu untuk membangun kualitas mental dan pribadi anak sehingga menghasilkan penerus bangsa yang berkepribadian baik. pemutaran film ini dilakukan sekali dalam setiap bulannya (kecuali bulan Ramadhan) dengan tempat yang berpindah-pindah. Sedangkan dalam bulan Ramadhan sendiri pemutaran film lebih ditujukan kepada TPA-TPA di Desa Panggungharjo. Kelima, Prau Kertas. Prau Kertas merupakan satu event yang mempunyai tujuan menggali potensi bakat anak di Desa Panggungharjo. PRAU KERTAS sendiri merupakan akronim dari “Panggungharjo Untuk Kreativitas Tanpa Batas”. Event yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali ini dalam penyelenggaraannya mempunyai tema dan kegiatan berbeda-beda tergantung dari hasil musyawarah panitia yang dibentuk oleh Forum Anak SADEPA.

Bumi Panggung

Kebudayaan adalah salah satu modal sosial yang bermanfaat sekaligus menjadi media pembelajaran untuk menciptakan kebersamaan, kerukunan, kedamaian, kerjasama, dan modal peningkatan serta menggali potensi diri. Dengan demikian, dinamika sosial akan selalu tumbuh bersamaan dengan pembangunan manusia melalui kebudayaan. Didasarkan atas kesadaran akan hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, sudah sepantasnya kita ikut serta dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional Indonesia. Khususnya kebudayaan yang berada di lingkungan Kalurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

29

Bumi Panggung merupakan sebuah akronim dari budaya minangka paugeran kang adiluhung dan mengandung makna bahwa semua peraturan serta produk hukum (pranatan dan paugeran) yang berlaku bermuara pada budaya lokal dan dilestarikan di Kalurahan Panggungharjo. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 07 Agustus 2016, berkedudukan di Kalurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Desa Panggungharjo merupakan daerah subur yang dilewati sumbu filosofi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumbu filosofi itu menjadi situs simbolis yang membelah sepanjang wilayah desa. Di ujung utara desa teladan nasional ini, Gedong Panggung/Kandang Menjangan (Panggung Krapyak) berdiri kokoh menjadi situs penting peninggalan Mataram. Semantara itu di batas paling selatan ditandai dengan adanya situs Yoni, yang menjadi simbol kesuburan masyarakat Mataram. Dengan ketiga situs inilah, kebudayaan tumbuh subur di desa yang terletak di bibir Jalan Lingkar Selatan ini. Sementara kehadiran Panggung Krapyak menyimbolkan bahwa Panggungharjo bukan hanya sebagai lumbung padi di masa lalu, melainkan juga pusat olahraga jemparingan, panahan, dan berburu. Hingga saat ini, jemparingan dan panahan masih dilestarikan.

Berada di wilayah perbatasan antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, serta terdapat kampus Institut Seni Indonesia, membuat pergerakkan budaya di Panggungharjo cukup dinamis. Tak ayal jika banyak yang menyebut bahwa desa yang dipimpin oleh Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt., ini juga menjadi lumbung kebudayaan. Lumbung kebudayaan memiliki tujuh unsur ekspresi budaya, yaitu: Bidang seni rupa, seni pertunjukkan, bahasa dan sastra, kuliner, pengobatan tradisional, warisan budaya, tata ruang, bangunan, dan lingkungan, serta permainan tradisional, adat, dan tradisi. Ketujuh ekspresi budaya tersebut tersebar di 14 pedukuhan dan mewadah dalam satu Lembaga Desa Budaya Bumi Panggung.

30

Tujuan didirikannya Bumi Panggung, yaitu: Menggali, melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan sehingga memperkuat karakter identitas masyarakat. Desa Panggungharjo menjadikan kebudayaan sebagai salah satu tatanan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara serta Melestarikan dan meningkatan ekspresi dan apresiasi seni budaya masyarakat Panggungharjo dengan menyelenggarakan event budaya untuk Mendorong dan mengembangkan kegiatan industri pariwisata berbasis budaya dan industri penunjangnya. Kemudian dengan hal ini bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah, lembaga-lembaga kebudayaan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan dan lapangan kerja, dari pendapatan asli desa.

BUMDes Panggung Lestari

Untuk menunjang Pendapatan Asli Kalurahan Panggungharjo, maka pada bulan Maret 2013, Pemerintah Kalurahan Panggungharjo mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDes Panggung Lestari. Selain bertujuan untuk meningkatkan Pendapata Asli Kalurahan, tujuan lain adalah untuk mengungkit perekonomian masyarakat.

Berdirinya BUMKal Panggung Lestari, awalnya dimulai dari unit usaha KUPAS (Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah) yang didirikan pada akhir tahun 2012. Dan pada bulan Maret 2013, melalui Perdes No.7/2013 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan KUPASDA didesain sebagai salah satu unit usaha Purusdes Panggung Lestari yang bergerak pada bidang jasa pengelolaan lingkungan.

Satu tahun setelah terbitnya UU No.6/2014 tentang Desa dan setelah Kementrian Desa PDTT menerbitkan Peraturan Menteri Desa No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengolahan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka Pemerintah Kalurahan Panggungharjo melakukan penyesuaian atas kedua peraturan tersebut, kemudian menerbitkan Peraturan Desa No.9/2015 tentang BUMKal. BUMKal Panggung Lestari mempunyai struktur organisasi yang terdisi dari : Direktur BUMKal Panggung Lestari, BPD sebagai pengawas, Pemerintah Desa sebagai penasehat (Lurah Panggungharjo). Staf Ahli Direktur, *Corporate Secretary* yang terbagi dalam 4 (empat) bagian yaitu bagian administrasi dan kepegawaian, keuangan, litbang dan HRM, serta Business Development Service. Kemudian unit usaha BUMKal Panggung Lestari terdiri dari unit usaha KUPAS (Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah), unit usaha PT Sinergi Panggung Lestari, unit usaha Kampoeng Mataraman, dan yang baru diluncurkan pada tanggal 13 April 2020 oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah Pasardesa.id.

31

Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS)

Pelayanan dan jaminan sosial merupakan suatu hal yang sangat diperlukan bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu, maka pemerintah diharuskan dapat berperan secara aktif memberikan pelayanan dan jaminan sosial tersebut. Sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, tertera bahwa: “pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan merupakan tanggung jawab pemerintah.” Sebagai wujud nyata menunjukkan peranannya terhadap pelayanan dan jaminan untuk masyarakat, Pemerintah Desa Panggungharjo pada tahun 2013 mendirikan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS) yang mempunyai tugas pokok memberikan layanan sosial kepada masyarakat terutama bagi warga yang kurang mampu dengan harapan terwujudnya masyarakat Panggungharjo yang sejahtera. Bapel JPS sendiri merupakan sebuah lembaga desa dengan tujuan menyelenggarakan program jaring pengaman sosial. Program jaring pengaman sosial sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat Desa Panggungharjo agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dengan menggunakan sumber pembiayaan dari pemerintah desa atau masyarakat.

Pendirian Bapel JPS ini mempunyai legalitas secara administratif dengan adanya Surat Keputusan Lurah Desa Panggungharjo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial. Adapun peserta dari Bapel JPS adalah PBI (penerima bantuan iuran), PBI-KUPAS (penerima bantuan iuran-KUPAS) dan MANDIRI. Peserta PBI adalah peserta yang menerima bantuan pembayaran iuran dari Pemerintah Desa dan masyarakat. Peserta PBI-KUPAS adalah peserta yang menerima bantuan pembayaran iuran dari Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari. Sedangkan untuk peserta mandiri adalah peserta yang mendaftar dan membayar iuran sendiri. Sumber pembiayaan untuk PBI (penerima bantuan iuran) didapatkan dari APBDes, zakat, infaq dan shodaqoh masyarakat, sumbangan/donasi, serta dana CSR (*Corporate Social Responsibility*). Sedangkan Peserta PBI-KUPAS didapatkan dari pembayaran iuran Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari.

32

Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan bagian tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam Bagian Ketiga UU Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. SID memiliki dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit SID dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas, SID diartikan sebagai suaturangkaian system, baik dari mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di desa.Pengelola Sistem Informasi Desa (PSID) sendiri merupakan sebuah lembaga khusus yang menangani bidang informasi yang dibutuhkan masyarakat baik dalam pembuatan aplikasi yang dibutuhkan untuk mempermudah akses pelayanan maupun system informasi yang mempermudah masyarakat untuk mengetahui kegiatan desa beserta pengelolaan anggarannya.

Tim IT lebih difokuskan dalam pembuatan aplikasi-aplikasi berbasis website/online untuk melayani masyarakat desa, seperti: Sistem Informasi Pembangunan Desa berbasis data spasial, Sistem Informasi Pelayanan Desa, Website Desa (www.panggungharjo.desa.id), Website Transparansi Anggaran Pembelanjaan dan Biaya Desa/Open APBDes (under constructing) dan Sistem Kearsipan Desa/E-Filing (under constructing) Disamping tugas-tugas pokok tersebut, PSID juga mempunyai tugas untuk menyediakan kebutuhan lembaga lain seperti website dan fanspage lembaga desa/lembaga kemasyarakatan desa. Beberapa fanspage facebook yang telah dibuat oleh PSID yaitu: Sanggar Anak Desa Panggungharjo, Karang Taruna Cahyaning Amerta, BUMDes Panggung Lestari, Bumi Panggung, Bapel JPS, dan Resigana. Keseluruhan fanspage facebook tersebut dikelola oleh masing-masing lembaga desa/lembaga kemasyarakatan desa yang bersangkutan dan dikontributori oleh Tim Media PSID baik dalam artikel maupun dokumentasi kegiatan.

Lembaga Mediasi Desa

LMD (Lembaga Mediasi Desa) merupakan lembaga desa yang bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang ada di Desa Panggungharjo yaitu LBH (Lembaga Bantuan Hukum) BUMI ADIL. Lembaga Mediasi Desa dibentuk pada tahun 2014 oleh Pemerintah Desa Panggungharjo, dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib aman, damai, sekaligus dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Pada tahun 2020, Pemerintah Desa Kelurahan Panggungharjo m elaksanakan MOU dengan SAMGAT (Lembaga Penelitian dan Pelatihan Mediasi) dengan tujuan untuk mengembangkan Lembaga Mediasi Desa Kalurahan Panggungharjo. Lingkup MOU tersebut mencangkup beberapa program yaitu: Penyelesaian sengketa/permasalahan hukum warga melalui mediasi; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; dan, pengembangan Sumber Daya Manusia. Kerjasama antara Samgat dan Kelurahan Panggungharjo diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh warga Kalurahan Panggungharjo dengan pendekatan berbasis kebudayaan, biasa disebut ’’*sosio religion dan business to business’’* serta mengedepankan metode musyawarah.

Kehadiran LMD Panggungharjo diharapkan mampu menjadi upaya control social agar pemerinta desa dan masyarakat tetap dapat menjaga harmonisasi serta keseimbangan sosial. Hal yang paling mendasar dari pembentukan Lembaga Mediasi Desa Panggungharjo adalah membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang melingkupi warga desa melalui non litigasi (di luar jalur pengadilan) serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan diantara para pihak yang bersengketa.

Para Ketua RT (PAKARTI) Majelis Muryo Condro

Untuk menyamakan persepsi demi mengapai satu tujuan yang sama, di Kalurahan Panggungharjo khusunya rukun tetangga, telah dibuat paguyuban yang bernama PAKARTI (Para Ketua Rukun Tetangga) se Kalurahan Panggungharjo. Di Kalurahan Panggungharjo memiliki 119 RT yang terbagi dalam setiap padukuhan. Lembaga PAKARTI berbentuk sebuah paguyuban yang tiap tahunnya melakukan pertemuan tiga hingga lima kali guna membahas persoalan-persoalan yang timbul di lingkup wilayah RT serta mempererat kerjasama antar sesama ketua RT yang ada di Kalurahan Panggungharjo.

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Manunggal

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Manunggal didirikan untuk mewujudkan salah satu program pemerintah yaitu terwujudnya kedaulatan pangan. Keberadaan GAPOKTAN merupakan pilar pembangunan pertanian, hal ini akan terwujud apabila pembangunan di bidang pertanian disandarkan pada kebutuhan dan kepentingan para petani. GAPOKTAN Manunggal yang ada di Kalurahan Panggunharjo menjadi salah satu Gapoktan yang berprestasi tingkat nasional tahun 2018.

33

Adapun lembaga Desa Panggungharjo ini dibentuk untuk mengampu sebagian besar pelayanan atas barang dan jasa kepada masyarakat dan besar harapan juga dapat mengurangi masalah sosial di kelurahan tersebut. Dengan adanya sistem pemerintahan yang sekarang dapat memeberi pengaruh besar terhadap Desa Panggungharjo dalam mengentaskan masalah sosial.[[9]](#footnote-9)

1. Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifa tpublik,yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (*developmental*).

Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya.Dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial Namun, tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan. Hukum dipandang sebagai pondasi atau landasan konstitusional bagi kebijakan sosial. Dalam hal ini, kebijakan dirumuskan berdasarkan amanat konstitusi. Di Indonesia, kebijakan sosial yang berkaitan dengan program jaminan sosial dirumuskan dengan merujuk pada UUD 1945 Pasal 34 dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)[[10]](#footnote-10).

34

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang pengaruh kepemimpinan dalam pengentasan masalah sosial di kelurahaan Desa Panggungharjo sangat berpengaruh karena dengan adanya struktur kepemimpinan yang sekarang, pengetasan masalah sosial di desa tersebut mulai berkurang dari sebelumnya.Desa Panggugharjo memakai sistm kepemimpinan demokratis, diamana sistem yang semestinya dipakai. Kepemimpinan Demokratis merupakan kepemimpinan yang mementingkan tercapainya tujuan kelompok seoptimal mungkin dengan cara mengikutsertakan partisipasi seluruh anggota kelompok, tenaga dan juga seluruh rasa tanggung jawab bersama. Dalam hal ini sistem kepimpinan sangat berpengaruh untuk mengentaskan masalah sosial guna untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kebijakan sosial dibuat oleh sistem kepemiminan dan disepakati secara bersama dengan masyarakatdan dikelola oleh sistem pemerintahan. Desa Panggungharjo merupakan sala satu desa patut dicontohkan dalam sistem kepemimpinan. Kemudian desa ini mempunyai prestasi dalam berbagai bidang yang patut di apresiasiakan.

Prestasi yang diperoleh Kalurahan Panggungharjo adalah sebagai buah dari kerja-kerja kesemestaan yang peruntukannya tidak hanya untuk yang berprestasi, bukan pula hanya untuk negara, tetapi untuk seluruh masyarakat Kalurahan Panggungharjo. Karya yang mengantarkan kalurahan Panggungharjo mendapatkan banyak apresiasi. Sehingga, karya tidak hanya sekedar pajangan untuk dipublikasikan, namun ada nilai yang membangkitkan semangat mewujudkan mimpi. Karena karya adalah sebagai penghormatan atas hidup.

**DAFTAR PUSTAKA**

Edi Suharto, Phd Tentang *kebijakan sosial lembaga.*

Jurnal Hartono, *Penanggulangan Kemiskinan Pusat Kesejahteraan Sosial* 2017.

Skripsi Jamaludin*, Pelayanan Pusat Kesejahteraan sosial (puskesos),* 2021 Sosial dan Politik Halu Oleo ,kendari.

Kartono,*kepemimpinan,*2009.

Prof, DR.Lexy J. Moeleong, MA, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* 2017, PT. Remaja Rosdakarya.

[www.Panggungharjo.desa.id](http://www.Panggungharjo.desa.id). 7 april 2022.

Hasil dokumentasi Kalurahan Pangguharjo 29 Maret 2022.

https://www.pangguharjo.desa.id/prestaso/.

Hasil wawancara bersama Hosni Bimo Wicaksono (Kamituwo Kalurahan Panggungharjo) dan masyarakat Panggungharjo 29 Maret 2022.

https://peraturan.bpk.go.id/Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

35

1. Edi Suharto,Phd *kebijakan sosial lembaga* hal 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jurnal Hartono, *Penanggulangan Kemiskinan Pusat Kesejahteraan Sosial* 2017. [↑](#footnote-ref-2)
3. Skripsi Jamaludin*, Pelayanan Pusat Kesejahteraan sosial(puskesos) ,*2021 Sosial dan Politik Halu Oleo ,kendari. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kartono, *kepemimpinan,*2009.hal 86 [↑](#footnote-ref-4)
5. Prof, DR.Lexy J.Moeleong,MA, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* 2017, PT Remaja Rosdakarya. [↑](#footnote-ref-5)
6. [www.Panggungharjo.desa.id](http://www.Panggungharjo.desa.id). 7 April 2022 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hasil dokumentasi kelurahan desa pangguharjo 29 maret 2022. [↑](#footnote-ref-7)
8. https://www.pangguharjo.desa.id/prestaso/. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hasil wawancara bersama bpk Bimo (TKSK) dan masyarakat panggungharjo 29 maret 2022 [↑](#footnote-ref-9)
10. https://peraturan.bpk.go.id/Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004. [↑](#footnote-ref-10)